

**IMPLEMENTASI PROGRAM PELAYANAN REHABILITASI
KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM PEMBINAAN GELANDANGAN
DAN PENGEMIS OLEH DINAS SOSIAL DI KOTA TANJUNGPINANG**

**Oleh:
Milawati
NIM:170563201002**

ABSTRAK

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan masalah sosial yang terjadi di Kota Tanjungpinang salah satunya gelandangan dan pengemis dijalanan yang mulai banyak ditemui, meminta-minta dijalan dan pusat keramaian dianggap pekerjaan yang mudah. Penelitian ini bertujuan untk melihat bagaimana pengimplementasian Dinsos terkait program pelayanan rehabilitasi pembinaan gelandangan dan pengemis di Kota Tanjungpinang. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif yang bersifat deskriptif yang berupa kata-kata dan data bukan atas dasar perhitungan persentase, rata-rata dan perhitungan stasistik, penelitian ini juga menggunakan model Donald Van Meter dan Carl Van Horn dalam mengimplementasi kebijakan kedua ahli kebijakan publik tersebut mengemukakan teori/modelnya beranjak dari suatu argumen, bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat dan kebijakan yang akan dilaksanakan. Hasil penelitan ini ialah Dinas Sosial berpegang teguh pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum tujuan dari kebijakan tersebut berfungsi untuk menertibkan PMKS yang ada di Kota Tanjungpinang melalui kerja sama dengan membentuk Tim Reaksi Cepat yang terdiri dari 3 instansi yaitu Dinas Sosial, Satpol PP dan Dinas Kesehatan yang memiliki fungsi dan tugas masing-masing. Dalam implementasi program pembinaan gelandangan dan pengemis di Kota Tanjungpinang pemerintah juga harus melihat dan memberikan bantuan finansial atau tempat penampungan dalam pemberlakuan program pembinaan gepeng ini, pihak terkait juga mungkin bisa memberikan efek jera terhadap gepeng.

Kata Kunci: Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Implementasi Dinas Sosial, Pengemis dan Gelandangan.

**IMPLEMENTATION OF A SOCIAL WELFARE REHABILITATION
SERVICE PROGRAM IN FOSTERING HOMELESS PEOPLE AND
BEGGARS BY THE SOCIAL SERVICES IN THE CITY OF
TANJUNGPINANG**

By:
MILAWATI
NIM: 170563201002

ABSTRACT

People with Social Welfare Problems (PMKS) is a social problem that occurs in Tanjungpinang City, one of which is that many homeless people and beggars are starting to be found on the streets, begging on the streets and busy centers is considered an easy job. This research aims to see how the Social Service implements a rehabilitation service program to foster homeless people and beggars in Tanjungpinang City. This research method uses qualitative descriptive in the form of words and data, not based on percentage calculations, averages and statistical calculations, this research also uses the Donald Van Meter and Carl Van Horn model in policy implementation. The two public policy experts put forward their theory/model starting from an argument, that differences in implementation processes will be influenced by the nature and policies to be implemented. The results of this research are that the Social Service complies with Regional Regulation Number 7 of 2018 concerning Public Order. The aim of this policy is to regulate PMKS in Tanjungpinang City through collaboration by forming a Rapid Response Team consisting of 3 agencies, namely the Social Service, Satpol PP and Health Service which have their respective functions and duties. In implementing the homeless and beggar development program in Tanjungpinang City, the government must also look at and provide financial assistance or shelter in implementing this sprawl development program, related parties may also be able to provide a deterrent effect against sprawl.

Keywords: People with Social Welfare Problems, Provision of Social Services, Beggars and Homelessness.